PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOH. ZAINURI**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**
3. NHK : **945840**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — **Rp. 1.200.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/135 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/67 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/50 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/70 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — **Rp. 272.500.000**

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
2. MOTOR, YAMAHA FREEGO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOTOR, HONDA CBR250 RR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000
4. MOTOR, YAMAHA GEAR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — **Rp. 17.300.000**

D. SURAT BERHARGA — **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS — **Rp. 230.000.000**

F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**1.719.800.000**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**1.719.800.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.